



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : PLN KANTOR PUSAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUWARNO**
2. Jabatan : **EXECUTIVE VICE PRESIDENT OPERASI PEMBANGKITAN DAN INDEPENDENT POWER PRODUCER**
3. NHK : **207111**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.498.760.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 905.720.000
2. Tanah Seluas 600 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 66.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m<sup>2</sup>/32 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 27.040.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m<sup>2</sup>/240 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 783.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
6. MOBIL, TOYOTA SEDAN CAMRY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
7. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.



	340.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	57.500.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	15.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	3.581.401.252
F. HARTA LAINNYA		Rp.	400.000.000
Sub Total		Rp.	8.336.161.252
III. HUTANG		Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	8.336.161.252

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.